

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

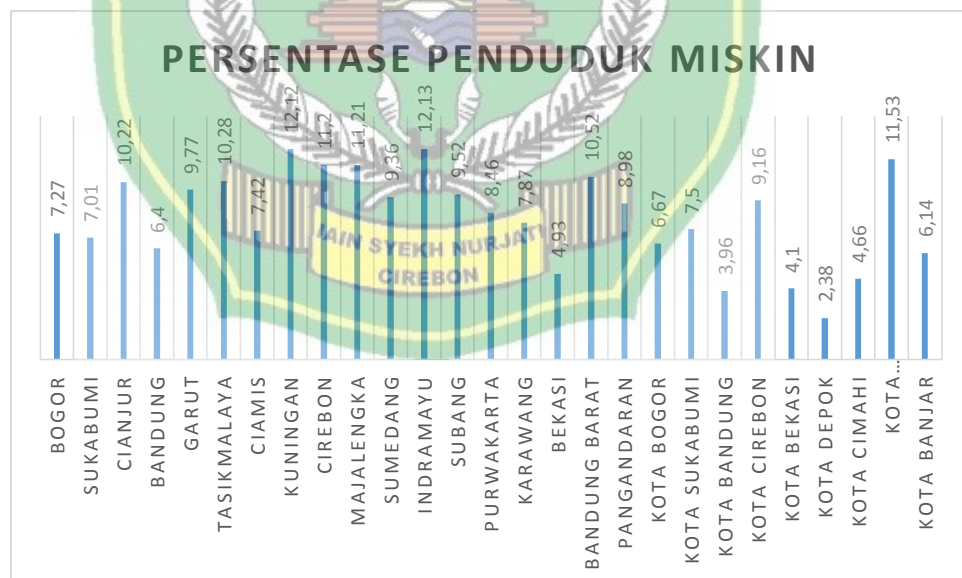
Salah satu tujuan utama dari usaha pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, yang dapat dicapai melalui peningkatan performa ekonomi. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan standar hidup yang memadai bagi seluruh penduduk Indonesia. Menurunkan tingkat kemiskinan adalah salah satu sasaran yang diinginkan dalam program pembangunan nasional. Meskipun beberapa negara berkembang telah mencatat kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi, dengan peningkatan produksi dan pendapatan nasional yang berarti, namun pada saat yang bersamaan, terjadi kesenjangan dalam distribusi pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Hal ini mengakibatkan terus meningkatnya tingkat kemiskinan meskipun pertumbuhan ekonomi mencatat kemajuan yang signifikan.

Permasalahan dalam aspek sosial yang sering terjadi adalah kemiskinan, yang menjadi masalah yang tak terhindarkan di berbagai negara berkembang. Indonesia, sebagai contoh negara berkembang, juga menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak dimensi. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi berbagai dimensi kehidupan masyarakat, dan dijalankan secara terpadu (Alwi, Syaparuddin, dan Hardiani 2021).

Permasalahan pokok terkait dengan kemiskinan adalah masalah ekonomi. Pentingnya hubungan yang terjalin antara kebijakan makroekonomi dengan kebijakan sosial, politik, dan budaya menjadi kunci penting dalam merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan. Ketika seseorang atau kelompok tidak mampu mencapai level ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimum untuk menjaga standar hidup tertentu, istilah "kemiskinan" sering digunakan. Menurut Prayoga (2021) Masalah kemiskinan melibatkan sejumlah faktor kompleks, termasuk tingkat

pendidikan, tingkat penyerapan tenaga kerja, tingkat kesehatan yang rendah, ketidaksetaraan dalam sistem hukum, ketidakmampuan masyarakat untuk menemukan peluang hidup, peningkatan jumlah pengangguran yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja, tingkat upah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kualitas hidup yang rendah bagi masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon tetap menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, jumlahnya mencapai 266,1 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2023, turun menjadi 249,18 ribu jiwa. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Provinsi Jawa Barat. Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Cirebon menempatkannya pada peringkat kelima tertinggi di Provinsi Jawa Barat.



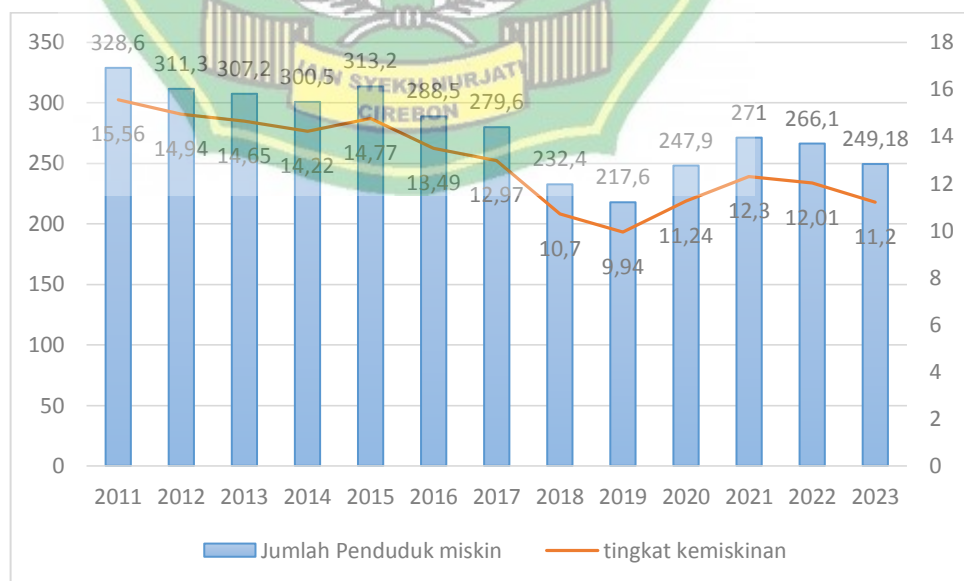
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Jawa Barat Tahun 2023

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Barat memiliki 27 total kota dan kabupaten, yang terdiri dari

18 kabupaten dan 9 kota, persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Jawa Barat dimiliki oleh Kabupaten Indramayu sebesar 12,13%, dan persentase penduduk miskin terkecil dimiliki oleh Kota Depok yakni sebesar 2,38% penduduk miskin. Kabupaten Cirebon sendiri masih memiliki persentase penduduk miskin yang cukup besar yakni sebesar 11,2%. Dikarenakan di Kabupaten Cirebon masih terdapat persentase penduduk miskin yang relatif cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sebesar 7,62%, kemiskinan harus tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Sebab jika ingin negara menjadi sebuah negara yang maju, maka negara tersebut harus mensejahterakan rakyatnya dan pengentasan kemiskinan ini ialah salah satu jalan alternatifnya. Masalah kemiskinan harus mendapat perhatian dimana lebih besar pemerintah mengingat hal itu secara khusus yang diidentikkan dengan keadaan penduduk.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami variasi dari tahun ke tahun. Data mengenai tingkat kemiskinan dari tahun 2011 hingga 2023 adalah sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2023

Berdasarkan data persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon diatas, terlihat jika dari tahun 2011-2023 persentase dan jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi. Kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011 berada di tingkat 15,56% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 328,6 ribu jiwa. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2013 terdapat di tingkat 14,65% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 307,2 ribu jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan terjadi pada tahun 2017 ke tahun 2018 yakni dari 12,97% menurun menjadi 10,7%, atau penurunan penduduk miskin sekitar 51,6 ribu jiwa. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon terus mengalami penurunan, hingga di tahun 2023 menjadi 11,2% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 249,18%. Akan tetapi jumlah tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Dari data kemiskinan tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan dari tahun 2011-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami tingkat penurunan, akan tetapi jika dibandingkan dengan 18 kabupaten dan 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih tergolong tinggi, karena masuk urutan ke lima dalam kategori kabupaten dan kota dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Selain itu kabupaten atau kota dinyatakan berhasil mengatasi kemiskinan jika tingkat kemiskinan kabupaten atau kota tersebut berada dibawah tingkat kemiskinan provinsi, sedangkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon sebesar 11,2% masih berada diatas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat sebesar 7,62%.

Salah satu cara untuk menilai kesejahteraan masyarakat adalah melalui indikator pendidikan. Pengalaman menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat, seperti dua sisi dari satu koin. Rendahnya pendidikan dapat menjadi penyebab kemiskinan, dan sebaliknya, kemiskinan dapat menjadi faktor rendahnya tingkat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu metode untuk meningkatkan mutu tenaga manusia. Melalui proses pendidikan, individu akan memperoleh pengetahuan yang bernilai, yang pada gilirannya akan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang penting dalam lingkungan kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dianggap sebagai suatu investasi dalam pembangunan yang akan menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati di masa mendatang (Susanto dan Pangesti 2019). Rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah bisa menyebabkan keterbelakangan ekonomi. Dalam skala besar, hal ini bisa berdampak pada tingkat kemiskinan. Berikut ini bisa disajikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Cirebon:

Tabel 1. 1 Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

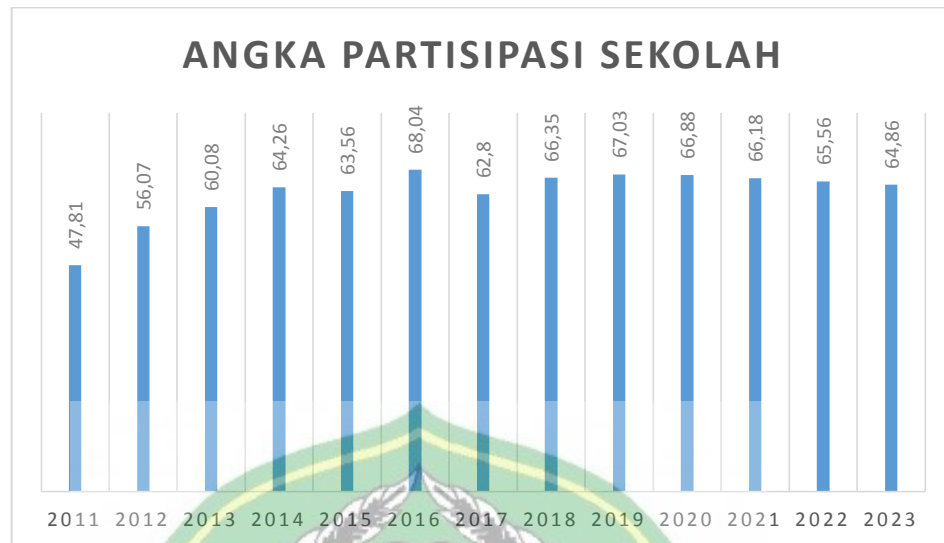
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	422
2	SMP	212
3	MTs	129
4	SMA	82
5	SMK	89
Total		934

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dapat dilihat dari data jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat total 934 sekolah yang beridiri di Kabupaten Cirebon. Yang terdiri dari 422 Sekolah Dasar (SD), 212 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 129 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 82 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 89 Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini menunjukkan bahwa, jumlah sekolah di Kabupaten Cirebon sudah cukup memadai, dikarenakan hampir di semua kecamatan yang ada sudah terdapat sekolah.

Salah satu indikator yang dapat memperlihatkan keterlibatan masarakat dalam menempuh pendidikan yakni dengan melihat angka partisipasi sekolah

yang ada di suatu daerah, berikut merupakan data angka partisipasi sekolah di Kabupaten Cirebon tahun 2011-2023:



Sumber: (Badan Pusat Statistik 2023)

Gambar 1.3 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Cirebon 2011-2023

Dari gambar diatas, dapat dikatakan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Cirebon selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sampai tahun 2016 angka partisipasi sekolah mengalami kenaikan yang secara bertahap dan tidak signifikan dari 47,81% menjadi 68,04%. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 62,8%. Pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari 66,35 menjadi 67,03. Kemudian pada tahun 2020-2023 angka partisipasi sekolah kembali mengalami penurunan dari 66,88 menjadi 64,86. Sehingga dapat disimpulkan dari penurunan angka partisipasi sekolah ini dapat diartikan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya tingkat pendidikan belum mulai disadari oleh masyarakat Kabupaten Cirebon, serta nilai angka partisipasi ini belum cukup untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang masih menjadi satu masalah di Kabupaten Cirebon.

Pendidikan memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat kemiskinan. Negara mendanai pendidikan sebagai upaya untuk membantu warganya mengatasi keteringgalan dan keterbelakangan. Dengan

peningkatan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang didapat, tingkat pendidikan seseorang akan meningkatkan produktivitasnya. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pendidikan menjadi salah satu fondasi penting bagi manusia. Sektor pendidikan memiliki peran yang besar dalam membentuk kemampuan suatu negara berkembang untuk mengadopsi teknologi modern dan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada gilirannya menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Yanthi dan Marhaeni 2015).

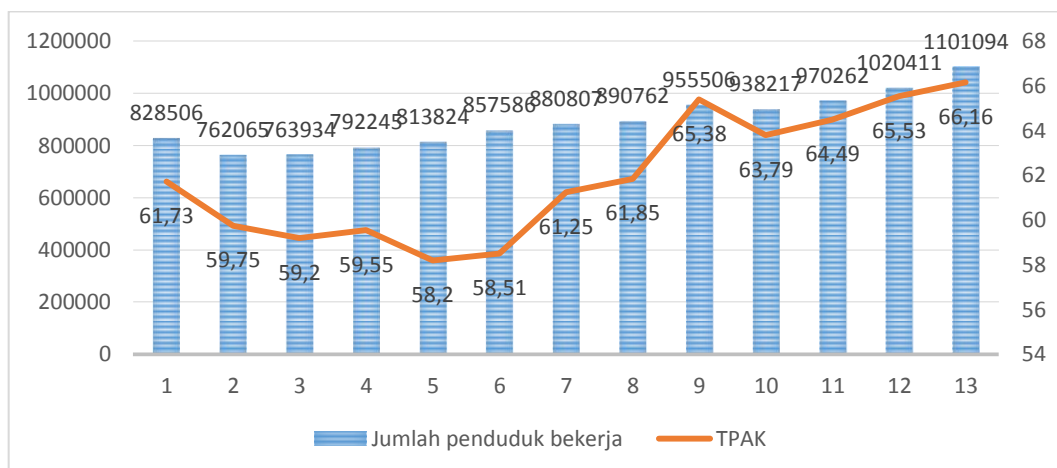
Seperti dimana yang ditunjukkan oleh hasil eksplorasi oleh Susanto dan Pangesti (2019), mereka yang percaya bahwa pendidikan memiliki dampak yang menguntungkan berpendapat bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang rendah akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, yang mengakibatkan kurangnya penghasilan dan akhirnya mendorong mereka ke dalam kemiskinan. Di sisi lain, orang yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih mungkin mendapatkan pekerjaan yang memberikan gaji yang cukup, yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan. Tapi tidak sebanding dengan hasil penelitian Suharlina (2020) bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan karena fakta bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan. Pendidikan yang baik mempengaruhi tingkat kesejahteraan individu, yang dapat membawa kemajuan bagi daerah tersebut.

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab dalam kemiskinan yaitu masalah penyerapan tenaga kerja, perekonomian suatu negara yang sedang berkembang hampir menghadapi masalah mengenai tenaga kerja, yakni antara meningkatnya jumlah penduduk yang harus bekerja yang tidak diimbangi dengan terbukanya jumlah lapangan yang mencukupi. Permasalahan akan ketenagakerjaan ini sangatlah kompleks dan problematis, karena masalah ketenagakerjaan ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, teknologi yang semakin berkembang dengan pesat, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki calon pekerja, serta faktor demografi. Menggambarkan tantangan

yang akan dihadapi oleh pasar tenaga kerja di masa depan tidaklah mudah karena tidak hanya mengandalkan data jumlah tenaga kerja di masa lalu, tetapi juga perlu memperhitungkan proyeksi produksi di masa yang akan datang (Mandak, Kumenaung, dan Sumual 2022).

Jumlah penduduk yang bekerja merupakan cerminan dari banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dan terisi, keadaan tersebut biasa disebut dengan penyerapan tenaga kerja (Yustitia, dkk 2022). Dengan demikian, berapa banyak tenaga kerja yang terserap adalah berapa banyak jumlah individu yang bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), penduduk yang bekerja merupakan penduduk yang usianya 15 tahun ke atas. Dengan demikian, penduduk yang telah memenuhi syarat untuk bekerja diperbolehkan untuk bekerja.

Jumlah orang yang berhasil terserap dalam pasar kerja mencerminkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Ketika lebih banyak individu dapat berpartisipasi dalam pekerjaan dan menerima pendapatan yang memadai, maka tingkat kemiskinan dapat menurun karena mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi. Penyerapan tenaga kerja yang efektif memberikan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan keluarga mereka, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Indikator penyerapan tenaga kerja di suatu daerah bisa dilihat melalui jumlah populasi yang bekerja di wilayah tersebut. Berikut adalah jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Cirebon selama periode 2011-2023:



Sumber : opendata.jabarprov.go.id (2023)

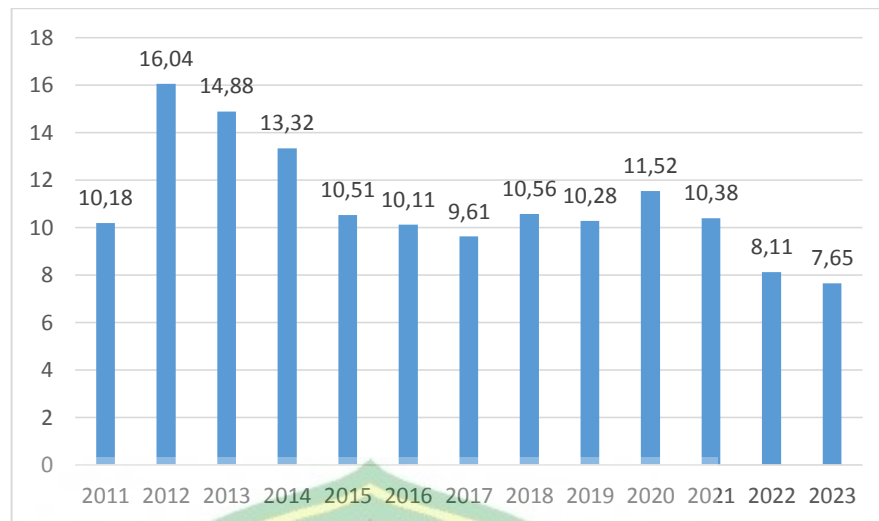
Gambar 1. 4 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Cirebon

Jika dilihat dari gambar diatas, sangat terlihat bahwa jumlah SDM yang bekerja atau tenaga kerja yang terserap berdasarkan informasi dari website opendatajabar, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2011 tercermin penduduk yang bekerja berada pada angka 828.506 jiwa dan pada tahun berikutnya menurun menjadi 762.065 jiwa. Kemudian penyerapan tenaga kerja ini terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, sampai pada tahun 2023 mencapai 1.101.094 jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon ini sudah meningkat disetiap tahunnya, akan tetapi masih belum bisa mengatasi kemiskinan di Kabupaten Cirebon, dikarenakan jumlah penduduk yang bekerja masih berjumlah setengah dari populasi penduduknya. Dengan demikian, keadaan jumlah penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon ini tentu saja masih bisa menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kemiskinan.

Dalam eksplorasi yang dilakukan oleh Prayoga, dkk (2021) telah teramati bahwa jumlah kesempatan kerja memiliki dampak yang cukup berarti terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena ini konsisten dengan prinsip penyerapan tenaga kerja yang diperkenalkan oleh Nurkse, dimana apabila proses penciptaan lapangan kerja terhambat, maka tingkat kemiskinan akan meningkat dan penyerapan tenaga kerja akan berkurang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ansori dan Priyono (2018) dari hasil yang diperoleh, terungkap bahwa penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang signifikan dengan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Mayoritas penerimaan terhambat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Selain itu, pengangguran dapat mengakibatkan penurunan produktivitas ekonomi karena terdapat lebih sedikit individu yang berkontribusi pada produksi barang dan jasa.

Akan tetapi jumlah tenaga kerja yang terserap tersebut masih tergolong sedikit jika mengingat banyaknya jumlah pengangguran yang masih belum

mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Cirebon. Adapun jumlah pengangguran di Kabupaten Cirebon yakni sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2011 dengan persentase 10,18%, kemudian mengalami peningkatan drastic hingga mencapai 16,04% pada tahun 2012. Pada tahun 2012-2017 tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 14,88% menjadi 9,61%. Kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 menjadi 10,56%. Dan pada tahun 2020-2023 mengalami penurunan dari 11,52% menjadi 7,65%.

Pengangguran disebabkan oleh kesenjangan antara tawaran pekerjaan dengan jumlah pekerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran juga bisa terjadi ketika banyak tenaga ahli yang kekurangan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia, perbedaan mendasar dalam keterampilan yang tersedia lebih besar yang dibutuhkan oleh perusahaan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk tidak bekerja atau menganggur (Yanthi dan , Marhaeni 2015).

Jadi untuk melengkapi beberapa variabel sebelumnya, peneliti menambahkan variabel intervening yang variabelnya ialah pengangguran. Pengangguran dipakai sebagai variabel yang seharusnya memediasi variabel dependen dan independen pada penelitian ini.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang sudah dipaparkan diatas ada batasan-batasan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel pendidikan dan penyerapan tenaga kerja, sehingga peneliti bisa melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Tingkat Pengangguran Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2023”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a) Ketika masyarakat tidak mampu atau tidak mempunyai motivasi yang tinggi untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi maka secara tidak langsung akan menambah tingkat kemiskinan di suatu daerah.
- b) Terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai dapat menyebabkan jumlah tenaga kerja yang terserap semakin menurun dan tingkat pengangguran yang semakin meningkat, sehingga akan menyebabkan terjadinya kemiskinan.
- c) Banyaknya persyaratan dalam lapangan pekerjaan akan menyebabkan penurunan tenaga kerja yang terserap dan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.
- d) Semakin banyaknya jumlah penduduk yang disebabkan migrasi masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain dapat menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak dari masyarakat yang bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

C. Batasan Masalah

Banyak sekali hal yang menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya akan membatasi masalah dengan hanya 2 faktor yaitu tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu peneliti juga memilih 1 faktor yang

dijadikan sebagai variabel mediasi yaitu pengangguran. Dalam penelitian ini peneliti juga membatasi rentang waktu data yakni hanya mengambil data dari tahun 2011-2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2023?
- b) Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2023?
- c) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2023?
- d) Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2023?
- e) Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013-2022?
- f) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran sebagai variabel intervening di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2023?
- g) Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran sebagai variabel intervening di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2023?

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2023.

- b) Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2023.
- c) Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2023.
- d) Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2023.
- e) Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2023.
- f) Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran sebagai variabel intervening di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2023.
- g) Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran sebagai variabel intervening di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2023.

F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah berikut:

- a) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pemikiran ilmiah dan mampu perbandingan teori dan prakteknya dalam masalah kemiskinan.

- b) Bagi Peneliti

Sebagai pendalaman pengetahuan materi yang didapat di perkuliahan dengan menerapkannya pada penelitian ini.

- c) Bagi Pemerintah

Menjadi informasi bagi pemerintah daerah untuk membuat keputusan dalam pengeluaran pemerintah untuk memaksimalkan kontribusi dimana berdampak pada kemiskinan.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini akan membahas tentang kajian terdahulu, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai waktu dan tempat penelitian, pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji instrument, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum penelitian, penyajian data, dan pembahasan mengenai penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini